



**PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan dalam pembiayaan pada tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); **L**

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 001);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 015);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.2.738.060.879.000,- bertambah sejumlah Rp.164.966.521.928,- sehingga menjadi Rp. 2.903.027.400.928,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 2.720.973.577.000,-
b. Bertambah	<u>Rp. 27.392.660.168,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.748.366.237.168,-

2. Belanja

a. Semula	Rp. 2.738.060.879.000,-
b. Bertambah	<u>Rp. 164.966.521.928,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 2.903.027.400.928,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (154.661.163.760,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 97.957.302.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 138.773.861.760,-</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 236.731.163.760,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 80.870.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.200.000.000,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 82.070.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 154.661.163.760,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,- 1

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp. 695.415.928.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 39.389.463.648,-</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 734.805.391.648,-

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp. 1.290.418.374.000,-
2) Berkurang	<u>(Rp. 11.259.654.480,-)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp. 1.279.158.719.520,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 735.139.275.000,-
2) Berkurang	<u>(Rp. 737.149.000,-)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 734.402.126.000,-

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 528.047.773.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 20.827.346.224,-</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp. 548.875.119.224,-

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 29.711.663.000,-
2) Berkurang	<u>(Rp. 3.301.290.000,-)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp. 26.410.373.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	55.816.821.000,-
2) Bertambah	Rp.	<u>7.629.141.924,-</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	63.445.962.924,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	81.839.671.000,-
2) Bertambah	Rp.	<u>14.234.265.500,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	96.073.936.500,-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan;		
a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak		
1) Semula	Rp.	84.494.874.000,-
2) Berkurang	(Rp.	<u>11.259.654.480,-)</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak setelah Perubahan	Rp.	73.235.219.520,-
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	1.131.687.590.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	1.131.687.590.000,-
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	74.235.910.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	74.235.910.000,- <i>h</i>

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp. 11.872.960.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 55.000.000,-</u>

Jumlah pendapatan hibah setelah

Perubahan Rp. 11.927.960.000,-

b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp. 717.287.620.000,-
2) Berkurang	<u>(Rp. 1.245.320.000,-)</u>

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi

khusus setelah Perubahan Rp. 716.042.300.000,-

c. Penerimaan dari Pihak Ketiga

1) Semula	Rp. 5.978.695.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 453.171.000,-</u>

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi

khusus setelah Perubahan Rp. 6.431.866.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 1.756.409.172.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 52.644.802.572,-</u>

Jumlah belanja-belanja tidak langsung

setelah Perubahan Rp. 1.809.053.974.572,-

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 981.651.707.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 112.321.719.356,-</u>

Jumlah belanja-belanja langsung

setelah Perubahan Rp. 1.093.973.426.356,- *h*

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 485.428.565.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 2.400.263.000,-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 487.828.828.000,-
b. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 923.507.620.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 5.959.272.000,-</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp. 929.466.892.000,-
c. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 40.940.000.000,-
2) Berkurang	<u>(Rp. 5.512.606.536,-)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp. 35.427.393.464,-
d. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp. 254.525.387.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 44.045.729.108,-</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 298.571.116.108,-
e. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp. 34.507.600.000,-
2) Berkurang	<u>(Rp. 331.200.000,-)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp. 34.176.400.000,-
f. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp. 17.500.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 6.083.345.000,-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 23.583.345.000,- <i>L</i>

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 78.682.504.600,-

2) Bertambah Rp. 1.524.277.320,-

Jumlah belanja pegawai setelah

Perubahan Rp. 80.206.781.920,-

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 490.392.272.050,-

2) Bertambah Rp. 47.630.692.829,-

Jumlah belanja barang dan jasa

setelah Perubahan Rp. 538.022.964.879,-

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 412.576.930.350,-

2) Bertambah Rp. 63.166.749.207,-

Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 475.743.679.557,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 97.957.302.000,-

2) Bertambah Rp. 138.773.861.760,-

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 236.731.163.760,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 80.870.000.000,-

2) Bertambah Rp. 1.200.000.000,-

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 82.070.000.000,- **L**

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 90.189.953.200,-

2) Bertambah Rp. 137.573.861.760,-

Jumlah SiLPA tahun anggaran

sebelumnya setelah Perubahan Rp. 227.763.814.960,-

b. Penerimaan kembali Penerimaan Pinjaman

1) Semula Rp. 7.767.348.800,-

2) Bertambah Rp. 1.200.000.000,-

Jumlah Penerimaan kembali Penerimaan

Pinjaman setelah Perubahan Rp. 8.967.348.800,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula Rp. 75.870.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah penyertaan modal (investasi)

setelah Perubahan Rp. 75.870.000.000,-

b. Pemberian pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 5.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 1.200.000.000,-

Jumlah pemberian pinjaman kepada

kelompok masyarakat setelah Perubahan Rp. 6.200.000.000,-

Pasal 5

(1) Untuk melakukan pendanaan terhadap keadaan darurat, dilakukan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; *h*

- c. berada di luar kendali pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya menggunakan belanja tidak terduga.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. *l*

Pasal 7

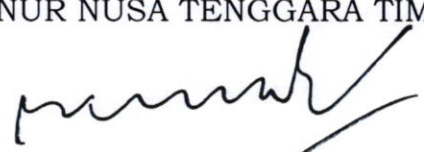
Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

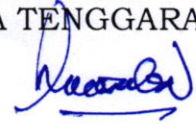
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 September 2014

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 15 September 2014

l SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ **FRANSISKUS SALEM**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014
NOMOR 08
NOMOR REGISTRASI PERDA PROVINSI NTT : (6/2014)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 8 Tahun 2014
 TANGGAL : 15 September 2014

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH'
TAHUN ANGGARAN 2014

Halaman 13

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.720.973.577.000,00	2.748.366.237.168,00	27.392.660.168,00	1,01
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	695.415.928.000,00	734.805.391.648,00	39.389.463.648,00	5,66
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah1)	528.047.773.000,00	548.875.119.224,00	20.827.346.224,00	3,94
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah 1)	29.711.663.000,00	26.410.373.000,00	(3.301.290.000,00)	(11,11)
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	55.816.821.000,00	63.445.962.924,00	7.629.141.924,00	13,67
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	81.839.671.000,00	96.073.936.500,00	14.234.265.500,00	17,39
4.2.	Dana Perimbangan	1.290.418.374.000,00	1.279.158.719.520,00	(11.259.654.480,00)	(0,87)
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	84.494.874.000,00	73.235.219.520,00	(11.259.654.480,00)	(13,33)
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.131.687.590.000,00	1.131.687.590.000,00	0,00	0,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	74.235.910.000,00	74.235.910.000,00	0,00	0,00
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	735.139.275.000,00	734.402.126.000,00	(737.149.000,00)	(0,10)
4.3.1.	Pendapatan Hibah	11.872.960.000,00	11.927.960.000,00	55.000.000,00	0,46
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	717.287.620.000,00	716.042.300.000,00	(1.245.320.000,00)	(0,17)
4.3.6.	Penerimaan dari Pihak Ketiga	5.978.695.000,00	6.431.866.000,00	453.171.000,00	7,58
	JUMLAH PENDAPATAN	2.720.973.577.000,00	2.748.366.237.168,00	27.392.660.168,00	1,01
5.	BELANJA DAERAH	2.738.060.879.000,00	2.903.027.400.928,00	164.966.521.928,00	6,02
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.756.409.172.000,00	1.809.053.974.572,00	52.644.802.572,00	3,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	485.428.565.000,00	487.828.828.000,00	2.400.263.000,00	0,49
5.1.4.	BELANJA HIBAH	923.507.620.000,00	929.466.892.000,00	5.959.272.000,00	0,65
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	40.940.000.000,00	35.427.393.464,00	(5.512.606.536,00)	(13,47)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	254.525.387.000,00	298.571.116.108,00	44.045.729.108,00	17,31
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	34.507.600.000,00	34.176.400.000,00	(331.200.000,00)	(0,96)
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.500.000.000,00	23.583.345.000,00	6.083.345.000,00	34,76
5.2.	BELANJA LANGSUNG	981.651.707.000,00	1.093.973.426.356,00	112.321.719.356,00	11,44
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	78.682.504.600,00	80.205.691.920,00	1.523.187.320,00	1,94
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	490.392.272.050,00	538.071.950.479,00	47.679.678.429,00	9,72
5.2.3.	BELANJA MODAL	412.576.930.350,00	475.695.783.957,00	63.118.853.607,00	15,30
	JUMLAH BELANJA	2.738.060.879.000,00	2.903.027.400.928,00	164.966.521.928,00	6,02
	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.087.302.000,00)	(154.661.163.760,00)	(137.573.861.760,00)	805,12
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	17.087.302.000,00	154.661.163.760,00	137.573.861.760,00	805,12
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	97.957.302.000,00	236.731.163.760,00	138.773.861.760,00	141,67
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	90.189.953.200,00	227.763.814.960,00	137.573.861.760,00	152,54
6.1.5.	Penerimaan Kembali dari Pemberian Pinjaman	7.767.348.800,00	8.967.348.800,00	1.200.000.000,00	15,45
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	97.957.302.000,00	236.731.163.760,00	138.773.861.760,00	141,67
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	80.870.000.000,00	82.070.000.000,00	1.200.000.000,00	1,48
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	75.870.000.000,00	75.870.000.000,00	0,00	0,00
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	6.200.000.000,00	1.200.000.000,00	24,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	80.870.000.000,00	82.070.000.000,00	1.200.000.000,00	1,48
	PEMBIAYAAN NETO	17.087.302.000,00	154.661.163.760,00	137.573.861.760,00	805,12
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 8 Tahun 2014

TANGGAL : 15 September 2014

**RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2014**

Halaman : 15

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan				Belanja							
		Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah/ (Berkurang)		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah / (Berkurang)	
				Rp	%	Tidak Langsung Rp	Langsung Rp	Jumlah Belanja Rp	Tidak Langsung Rp	Langsung Rp	Jumlah Belanja Rp	Rp	%
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
1.	URUSAN WAJIB	2.714.192.377.000,00	2.741.600.137.168,00	27.407.760.168,00	1,01	1.681.990.672.000,00	854.598.549.000,00	2.536.589.221.000,00	1.728.833.812.572,00	940.304.139.156,00	2.669.137.951.728,00	132.548.730.728,00	5,23
1.01.	PENDIDIKAN	390.000.000,00	242.500.000,00	(147.500.000,00)	(37,82)	21.465.000.000,00	33.691.704.000,00	55.156.704.000,00	20.195.363.000,00	38.870.419.345,00	59.065.782.345,00	3.909.078.345,00	7,09
1.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	390.000.000,00	242.500.000,00	(147.500.000,00)	(37,82)	21.465.000.000,00	33.691.704.000,00	55.156.704.000,00	20.195.363.000,00	38.870.419.345,00	59.065.782.345,00	3.909.078.345,00	7,09
1.02.	KESEHATAN	62.960.000.000,00	68.066.765.500,00	5.106.765.500,00	8,11	84.669.600.000,00	113.900.227.000,00	198.569.827.000,00	84.669.600.000,00	124.356.465.847,00	209.026.065.847,00	10.456.238.847,00	5,27
1.02.01.	Dinas Kesehatan	460.000.000,00	460.000.000,00			17.716.600.000,00	23.169.708.000,00	40.886.308.000,00	17.716.600.000,00	22.803.908.000,00	40.520.508.000,00	(365.800.000,00)	(0,89)
1.02.02.	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	62.500.000.000,00	67.606.765.500,00	5.106.765.500,00	8,17	66.953.000.000,00	90.730.519.000,00	157.683.519.000,00	66.953.000.000,00	101.552.557.847,00	168.505.557.847,00	10.822.038.847,00	6,86
1.03.	PEKERJAAN UMUM	400.000.000,00	400.000.000,00			33.004.700.000,00	345.510.497.000,00	378.515.197.000,00	31.669.700.000,00	401.126.416.550,00	432.796.116.550,00	54.280.919.550,00	14,34
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum	400.000.000,00	400.000.000,00			33.004.700.000,00	345.510.497.000,00	378.515.197.000,00	31.669.700.000,00	401.126.416.550,00	432.796.116.550,00	54.280.919.550,00	14,34
1.04.	PERUMAHAN												
1.05.	PENATAAN RUANG												
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN					11.751.300.000,00	44.847.742.000,00	56.599.042.000,00	13.404.466.000,00	47.280.475.650,00	60.684.941.650,00	4.085.899.650,00	7,22
1.06.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					8.413.000.000,00	42.984.101.000,00	51.397.101.000,00	7.228.000.000,00	42.984.101.000,00	50.212.101.000,00	(1.185.000.000,00)	(2,31)
1.06.02.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah					3.338.300.000,00	1.863.641.000,00	5.201.941.000,00	3.426.172.000,00	2.032.532.000,00	5.458.704.000,00	256.763.000,00	4,94
1.06.03.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah								2.750.294.000,00	2.263.842.650,00	5.014.136.650,00	5.014.136.650,00	
1.07.	PERHUBUNGAN	486.475.000,00	486.475.000,00			11.424.500.000,00	7.922.483.000,00	19.346.983.000,00	11.448.507.000,00	7.976.820.500,00	19.425.327.500,00	78.344.500,00	0,40

1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
1.07.01.	Dinas Perhubungan	486.475.000,00	486.475.000,00			11.424.500.000,00	7.922.483.000,00	19.346.983.000,00	11.448.507.000,00	7.976.820.500,00	19.425.327.500,00	78.344.500,00	0,40
1.08.	LINGKUNGAN HIDUP	125.000.000,00	125.000.000,00			5.849.300.000,00	4.410.600.000,00	10.259.900.000,00	5.849.300.000,00	4.435.600.000,00	10.284.900.000,00	25.000.000,00	0,24
1.08.01.	Badan Lingkungan Hidup Daerah	125.000.000,00	125.000.000,00			5.849.300.000,00	4.410.600.000,00	10.259.900.000,00	5.849.300.000,00	4.435.600.000,00	10.284.900.000,00	25.000.000,00	0,24
1.10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL								3.685.334.000,00	3.386.130.000,00	7.071.464.000,00	7.071.464.000,00	
1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								3.685.334.000,00	3.386.130.000,00	7.071.464.000,00	7.071.464.000,00	
1.11.01.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA												
1.13.	SOSIAL	160.388.000,00	160.388.000,00			16.633.800.000,00	20.583.000.000,00	37.216.800.000,00	16.283.800.000,00	21.275.400.000,00	37.559.200.000,00	342.400.000,00	0,92
1.13.01.	Dinas Sosial	160.388.000,00	160.388.000,00			16.633.800.000,00	20.583.000.000,00	37.216.800.000,00	16.283.800.000,00	21.275.400.000,00	37.559.200.000,00	342.400.000,00	0,92
1.14.	KETENAGAKERJAAN	70.000.000,00	70.000.000,00			13.742.700.000,00	8.898.000.000,00	22.640.700.000,00	13.642.700.000,00	9.279.000.000,00	22.921.700.000,00	281.000.000,00	1,24
1.14.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	70.000.000,00	70.000.000,00			13.742.700.000,00	8.898.000.000,00	22.640.700.000,00	13.642.700.000,00	9.279.000.000,00	22.921.700.000,00	281.000.000,00	1,24
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	43.200.000,00	43.200.000,00			7.489.700.000,00	4.002.793.000,00	11.492.493.000,00	7.369.959.000,00	4.062.793.000,00	11.432.752.000,00	(59.741.000,00)	(0,52)
1.15.01.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	43.200.000,00	43.200.000,00			7.489.700.000,00	4.002.793.000,00	11.492.493.000,00	7.369.959.000,00	4.062.793.000,00	11.432.752.000,00	(59.741.000,00)	(0,52)
1.16.	PENANAMAN MODAL					3.397.200.000,00	2.803.136.000,00	6.200.336.000,00	3.516.940.000,00	2.928.464.000,00	6.445.404.000,00	245.068.000,00	3,95
1.16.01.	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah					3.397.200.000,00	2.803.136.000,00	6.200.336.000,00	3.516.940.000,00	2.928.464.000,00	6.445.404.000,00	245.068.000,00	3,95
1.17.	KEBUDAYAAN	65.000.000,00		(65.000.000,00)	(100,00)	11.049.400.000,00	18.350.913.000,00	29.400.313.000,00				(29.400.313.000,00)	(100,00)
1.17.01.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	65.000.000,00		(65.000.000,00)	(100,00)	11.049.400.000,00	18.350.913.000,00	29.400.313.000,00				(29.400.313.000,00)	(100,00)
1.18.	PEMUDA DAN OLAHRAGA		147.500.000,00	147.500.000,00					6.873.107.000,00	8.490.342.050,00	15.363.449.050,00	15.363.449.050,00	
1.18.01.	Dinas Pemuda dan Olahraga		147.500.000,00	147.500.000,00					6.873.107.000,00	8.490.342.050,00	15.363.449.050,00	15.363.449.050,00	
1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					16.870.100.000,00	11.515.105.000,00	28.385.205.000,00	16.260.098.000,00	12.268.983.000,00	28.529.081.000,00	143.876.000,00	0,51
1.19.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					4.856.300.000,00	4.246.921.000,00	9.103.221.000,00	4.777.847.000,00	4.246.921.000,00	9.024.768.000,00	(78.453.000,00)	(0,86)
1.19.02.	Satuan Polisi Pamong Praja					7.299.200.000,00	3.395.631.000,00	10.694.831.000,00	7.477.652.000,00	3.636.009.000,00	11.113.661.000,00	418.830.000,00	3,92
1.19.03.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					4.714.600.000,00	3.872.553.000,00	8.587.153.000,00	4.004.599.000,00	4.386.053.000,00	8.390.652.000,00	(196.501.000,00)	(2,29)

1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	2.649.413.514.000,00	2.671.779.508.668,00	22.365.994.668,00	0,84	1.413.241.672.000,00	211.998.846.000,00	1.625.240.518.000,00	1.462.375.447.572,00	226.211.333.214,00	1.688.586.780.786,00	63.346.262.786,00	3,90
1.20.01.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					15.503.200.000,00		15.503.200.000,00	15.503.200.000,00		15.503.200.000,00		
1.20.02.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2.119.100.000,00		2.119.100.000,00	2.119.100.000,00		2.119.100.000,00		
1.20.03.	Sekretariat Daerah	2.092.215.046.000,00	2.096.467.213.444,00	4.252.167.444,00	0,20	1.270.980.607.000,00		1.270.980.607.000,00	1.321.225.146.572,00		1.321.225.146.572,00	50.244.539.572,00	3,95
1.20.03.01.	Biro Umum	150.000.000,00	150.000.000,00			55.928.335.000,00	34.141.171.000,00	90.069.506.000,00	46.321.359.000,00	35.504.527.452,00	81.825.886.452,00	(8.243.619.548,00)	(9,15)
1.20.03.02.	Biro Keuangan						14.747.167.000,00	14.747.167.000,00		16.609.445.800,00	16.609.445.800,00	1.862.278.800,00	12,63
1.20.03.03.	Biro Kepegawaian						8.335.196.000,00	8.335.196.000,00				(8.335.196.000,00)	(100,00)
1.20.03.04.	Biro Hukum						3.360.000.000,00	3.360.000.000,00		3.525.500.000,00	3.525.500.000,00	165.500.000,00	4,93
1.20.03.05.	Biro Organisasi						2.947.813.000,00	2.947.813.000,00		2.957.813.800,00	2.957.813.800,00	10.000.800,00	0,34
1.20.03.06.	Biro Administrasi Pembangunan						4.730.597.000,00	4.730.597.000,00		5.182.587.500,00	5.182.587.500,00	451.990.500,00	9,55
1.20.03.07.	Biro Perekonomian						2.240.570.000,00	2.240.570.000,00		2.765.370.000,00	2.765.370.000,00	524.800.000,00	23,42
1.20.03.08.	Biro Kesejahteraan Rakyat						7.171.138.000,00	7.171.138.000,00		7.171.138.000,00	7.171.138.000,00		
1.20.03.09.	Biro Pemberdayaan Perempuan						2.829.950.000,00	2.829.950.000,00				(2.829.950.000,00)	(100,00)
1.20.03.10.	Biro Pemerintahan						1.999.504.000,00	1.999.504.000,00		2.974.843.100,00	2.974.843.100,00	975.339.100,00	48,78
1.20.03.11.	Biro Hubungan Masyarakat								10.334.400.000,00	49.848.415.550,00	60.182.815.550,00	1.083.362.550,00	1,83
1.20.04.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					10.334.400.000,00	48.765.053.000,00	59.099.453.000,00					
1.20.05.	Inspektorat					7.357.900.000,00	7.426.896.000,00	14.784.796.000,00	6.912.900.000,00	9.747.378.350,00	16.660.278.350,00	1.875.482.350,00	12,69
1.20.06.	Kantor Penghubung	500.000.000,00	500.000.000,00				2.809.420.000,00	2.809.420.000,00		3.000.420.000,00	3.000.420.000,00	191.000.000,00	6,80
1.20.07.	Dinas Pendapatan dan Aset Daerah	535.548.468.000,00	556.855.985.224,00	21.307.517.224,00	3,98	36.400.530.000,00	40.238.149.000,00	76.638.679.000,00	38.808.109.000,00	47.044.751.000,00	85.852.860.000,00	9.214.181.000,00	12,02
1.20.08.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	19.000.000.000,00	15.806.310.000,00	(3.193.690.000,00)	(16,81)	10.331.800.000,00	25.972.489.000,00	36.304.289.000,00	8.632.747.000,00	22.556.523.450,00	31.189.270.450,00	(5.115.018.550,00)	(14,09)
1.20.09.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00			2.676.100.000,00	1.688.604.000,00	4.364.704.000,00	2.512.754.000,00	1.713.604.000,00	4.226.358.000,00	(138.346.000,00)	(3,17)
1.20.10.	Sekretariat Dewan Korpri					1.609.700.000,00	2.595.129.000,00	4.204.829.000,00	1.906.677.000,00	2.688.630.300,00	4.595.307.300,00	390.478.300,00	9,29
1.20.11.	Badan Kepegawaian Daerah								8.099.055.000,00	8.808.770.212,00	16.907.825.212,00	16.907.825.212,00	
1.21.	KETAHANAN PANGAN					8.000.300.000,00	9.377.210.000,00	17.377.510.000,00	8.000.300.000,00	10.035.736.000,00	18.036.036.000,00	658.526.000,00	3,79

1	2	3	4	5=4.3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
1.21.01.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan					8.000.300.000,00	9.377.210.000,00	17.377.510.000,00	8.000.300.000,00	10.035.736.000,00	18.036.036.000,00	658.526.000,00	3,79
1.22.	PEMERBAYAAN MASYARAKAT DESA	16.000.000,00	16.000.000,00			4.663.400.000,00	5.298.488.000,00	9.961.888.000,00	4.600.745.000,00	5.589.815.000,00	10.190.560.000,00	228.672.000,00	2,30
1.22.01.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	16.000.000,00	16.000.000,00			4.663.400.000,00	5.298.488.000,00	9.961.888.000,00	4.600.745.000,00	5.589.815.000,00	10.190.560.000,00	228.672.000,00	2,30
1.23.	STATISTIK												
1.24.	KEARSIPAN					3.969.100.000,00	2.448.696.000,00	6.417.796.000,00	4.043.378.000,00	2.737.009.000,00	6.780.387.000,00	362.591.000,00	5,65
1.24.01.	Badan Arsip Daerah					3.969.100.000,00	2.448.696.000,00	6.417.796.000,00	4.043.378.000,00	2.737.009.000,00	6.780.387.000,00	362.591.000,00	5,65
1.25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	22.800.000,00	22.800.000,00			8.024.400.000,00	5.724.045.000,00	13.748.445.000,00	8.200.568.000,00	6.677.872.000,00	14.878.440.000,00	1.129.995.000,00	8,22
1.25.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.800.000,00	22.800.000,00			6.553.100.000,00	3.447.070.000,00	10.000.170.000,00	5.704.401.000,00	2.985.331.800,00	8.689.732.800,00	(1.310.437.200,00)	(13,10)
1.25.02.	Kantor Pengolahan Data Elektronik					1.471.300.000,00	2.276.975.000,00	3.748.275.000,00	1.590.296.000,00	2.393.817.200,00	3.984.113.200,00	235.838.200,00	6,29
1.25.03.	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah								905.871.000,00	1.298.723.000,00	2.204.594.000,00	2.204.594.000,00	
1.26.	PERPUSTAKAAN	40.000.000,00	40.000.000,00			6.744.500.000,00	3.315.064.000,00	10.059.564.000,00	6.744.500.000,00	3.315.064.000,00	10.059.564.000,00	10.059.564.000,00	16,09
1.26.01.	Badan Perpustakaan Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00			6.744.500.000,00	3.315.064.000,00	10.059.564.000,00	6.744.500.000,00	3.315.064.000,00	10.059.564.000,00	10.059.564.000,00	16,09
2.	URUSAN PILIHAN	6.781.200.000,00	6.766.100.000,00	(15.100.000,00)	(0,22)	74.418.500.000,00	127.053.158.000,00	201.471.658.000,00	80.220.162.000,00	153.669.287.200,00	233.889.449.200,00	32.417.791.200,00	1,49
2.01.	PERTANIAN	4.732.000.000,00	4.151.900.000,00	(580.100.000,00)	(12,26)	40.061.200.000,00	51.715.329.000,00	91.776.529.000,00	39.569.986.000,00	53.577.900.500,00	93.147.886.500,00	1.371.357.500,00	(0,10)
2.01.01.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.732.000.000,00	668.000.000,00	(1.064.000.000,00)	(61,43)	26.685.400.000,00	30.813.429.000,00	57.498.829.000,00	26.185.399.000,00	31.254.217.500,00	57.439.616.500,00	1.430.570.000,00	4,17
2.01.02.	Dinas Peternakan	3.000.000.000,00	3.483.900.000,00	483.900.000,00	16,13	13.375.800.000,00	20.901.900.000,00	34.277.700.000,00	13.384.587.000,00	22.323.683.000,00	35.708.270.000,00	1.600.418.600,00	8,68
2.02.	KEHUTANAN	80.400.000,00	80.400.000,00			6.109.300.000,00	12.335.140.000,00	18.444.440.000,00	6.721.027.000,00	13.323.831.600,00	20.044.858.600,00	(245.970.900,00)	(1,33)
2.02.01.	Dinas Kehutanan	80.400.000,00	80.400.000,00			6.109.300.000,00	12.335.140.000,00	18.444.440.000,00	6.070.406.000,00	12.128.063.100,00	18.138.469.100,00	1.846.389.500,00	1,846
2.02.02.	Kecamatan Pengelolaan Hutan Lindung Model Mutis Timau								650.621.000,00	1.195.768.500,00			
2.03.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	200.000.000,00	200.000.000,00			6.882.800.000,00	8.259.164.000,00	15.141.964.000,00	6.786.358.000,00	9.269.164.000,00	16.055.522.000,00	913.558.000,00	6,03
2.03.01.	Dinas Pertambangan dan Energi	200.000.000,00	200.000.000,00			6.882.800.000,00	8.259.164.000,00	15.141.964.000,00	6.786.358.000,00	9.269.164.000,00	16.055.522.000,00	913.558.000,00	6,03
2.04.	PARAWISATA		65.000.000,00	65.000.000,00					6.262.384.000,00	12.670.930.100,00	18.933.314.100,00	18.933.314.100,00	
2.04.01.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		65.000.000,00	65.000.000,00					6.262.384.000,00	12.670.930.100,00	18.933.314.100,00	18.933.314.100,00	
2.05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	500.000.000,00	33,33	10.876.500.000,00	41.960.589.000,00	52.837.089.000,00	10.426.500.000,00	51.764.525.000,00	62.191.025.000,00	9.353.936.000,00	17,70

1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
2.05.01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	500.000.000,00	33,33	10.876.500.000,00	41.960.589.000,00	52.837.089.000,00	10.426.500.000,00	51.764.525.000,00	62.191.025.000,00	9.353.936.000,00	17,70
2.06.	PERDAGANGAN					10.488.700.000,00	12.782.936.000,00	23.271.636.000,00	10.453.907.000,00	13.062.936.000,00	23.516.843.000,00	245.207.000,00	1,05
2.07.	INDUSTRI	268.800.000,00	268.800.000,00			10.488.700.000,00	12.782.936.000,00	23.271.636.000,00	10.453.907.000,00	13.062.936.000,00	23.516.843.000,00	245.207.000,00	1,05
2.07.01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	268.800.000,00	268.800.000,00			10.488.700.000,00	12.782.936.000,00	23.271.636.000,00	10.453.907.000,00	13.062.936.000,00	23.516.843.000,00	245.207.000,00	
2.08.	KETRANSMIGRASIAN												
	JUMLAH	2.720.973.577.000,00	2.748.366.237.168,00	(27.392.660.168,00)	1,01	1.756.409.172.000,00	981.651.707.000,00	2.738.060.879.000,00	1.809.053.974.572,00	1.093.973.426.356,00	2.903.027.400.928,00	164.966.521.928,00	6,02
Kode	Uraian	Penerimaan			Pengeluaran			Pembiayaan			SILPA TAB Netto		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN WAJIB	236.731.163.760,00	82.070.000.000,00	154.661.163.760,00	-								
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	236.731.163.760,00	82.070.000.000,00	154.661.163.760,00	-								
	Sekretariat Daerah	236.731.163.760,00	82.070.000.000,00	154.661.163.760,00	-								

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 8 Tahun 2014
TANGGAL : 15 September 2014

**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

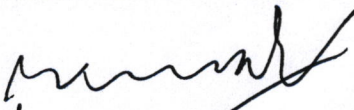
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman : 20

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM / PENJELASAN
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.1.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	390.000.000,00	242.500.000,00	(147.500.000,00)	(37,82)	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	390.000.000,00	242.500.000,00	(147.500.000,00)	(37,82)	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah 1)	390.000.000,00	242.500.000,00	(147.500.000,00)	(37,82)	Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum
	JUMLAH PENDAPATAN	390.000.000,00	242.500.000,00	(147.500.000,00)	(37,82)	
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	55.156.704.000,00	59.065.782.345,00	3.909.078.345,00	7,09	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.465.000.000,00	20.195.363.000,00	(1.269.637.000,00)	(5,91)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	21.465.000.000,00	20.195.363.000,00	(1.269.637.000,00)	(5,91)	
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	33.691.704.000,00	38.870.419.345,00	5.178.715.345,00	15,37	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.852.987.250,00	3.077.576.000,00	224.588.750,00	7,87	
1.01.1.01.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	50.000.000,00	57.800.000,00	7.800.000,00	15,60	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	57.800.000,00	7.800.000,00	15,60	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07.2.07.01.16.05.	PELATIHAN / BIMBINGAN TEKNOLOGI PROSES PENGOLAHAN DAN BANTUAN PERALATAN SERTA KEMASAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH	5.476.954.000,00	5.476.954.000,00	0,00	0,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	197.350.000,00	197.350.000,00	0,00	0,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.937.604.000,00	4.937.604.000,00	0,00	0,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	342.000.000,00	342.000.000,00	0,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	23.271.636.000,00	23.516.843.000,00	245.207.000,00	1,05	
	Surplus/(Defisit)	(23.002.836.000,00)	(23.248.043.000,00)	(245.207.000,00)	1,07	

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

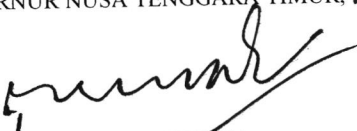
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 8 Tahun 2014
TANGGAL : 15 September 2014

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
I.	URUSAN WAJIB	70.294.054.600,00	381.658.084.950,00	383.968.413.950,00	835.920.553.500,00	71.345.012.245,00	416.948.158.474,00	443.850.926.437,00	932.144.097.156,00	96.223.543.656,00	11,51
I.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.198.850.000,00	30.315.590.000,00	1.177.264.000,00	33.691.704.000,00	2.384.000.000,00	34.866.615.945,00	1.619.803.400,00	38.870.419.345,00	5.178.715.345,00	15,37
I.01.	PENDIDIKAN	2.109.700.000,00	24.786.903.450,00	1.177.264.000,00	28.073.867.450,00	2.337.500.000,00	28.726.499.245,00	1.510.653.400,00	32.574.652.645,00	4.500.785.195,00	16,03
I.01.I.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.430.400.000,00	1.122.587.250,00	300.000.000,00	2.852.987.250,00	1.542.600.000,00	1.304.976.000,00	230.000.000,00	3.077.576.000,00	224.588.750,00	7,87
I.01.I.01.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	57.800.000,00	0,00	57.800.000,00	7.800.000,00	15,60
I.01.I.01.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	506.337.250,00	0,00	506.337.250,00	0,00	606.480.000,00	0,00	606.480.000,00	100.142.750,00	19,78
I.01.I.01.01.01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	13.800.000,00	7.250.000,00	0,00	21.050.000,00	12.300.000,00	140,57
I.01.I.01.01.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	740.400.000,00	0,00	0,00	740.400.000,00	866.400.000,00	3.380.000,00	0,00	869.780.000,00	129.380.000,00	17,47
I.01.I.01.01.01.08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	538.200.000,00	67.000.000,00	0,00	605.200.000,00	441.600.000,00	84.500.000,00	0,00	526.100.000,00	(79.100.000,00)	(13,07)
I.01.I.01.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	110.717.000,00	0,00	110.717.000,00	10.717.000,00	10,72
I.01.I.01.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	107.200.000,00	0,00	107.200.000,00	7.200.000,00	7,20
I.01.I.01.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	16.125.000,00	230.000.000,00	246.125.000,00	(53.875.000,00)	(17,96)
I.01.I.01.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00	600.000,00	3,87
I.01.I.01.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	12.000.000,00	16,00
I.01.I.01.01.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
I.01.I.01.01.01.19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	28.424.000,00	0,00	28.424.000,00	8.424.000,00	42,12

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
		0,00	269.144.000,00	0,00	269.144.000,00	0,00	269.144.000,00	0,00	269.144.000,00	0,00	0,00
2.07.2.07.01.16.03.	Bimbingan Teknis Industri Pengolahan (Pakan Ternak Basis Jagung)										
2.07.2.07.01.16.04.	Fasilitasi Sertifikasi, Perbaikan Kemasan Produk IKM dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Produk Tenun Motif Khas NTT	0,00	265.329.000,00	0,00	265.329.000,00	0,00	265.329.000,00	0,00	265.329.000,00	0,00	0,00
2.07.2.07.01.16.05.	Pelatihan / Bimbingan Teknologi Proses Pengolahan dan Bantuan Peralatan serta Kemasan Komoditi Unggulan Daerah	197.350.000,00	4.937.604.000,00	342.000.000,00	5.476.954.000,00	197.350.000,00	4.937.604.000,00	342.000.000,00	5.476.954.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		78.682.504.600,00	490.392.272.050,00	412.576.930.350,00	981.651.707.000,00	80.205.691.920,00	538.071.950.479,00	475.695.783.957,00	1.093.973.426.356,00	112.321.719.356,00	11,44

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 2

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 8 Tahun 2014

TANGGAL : 15 September 2014

**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014**

Halaman 436

KODE	URAIAN	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
				Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
01.	Pelayanan Umum	260.605.853.962,00	280.943.540.876,00	20.337.686.914,00	7,80
01.1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	43.479.294.862,00	44.745.117.462,00	1.265.822.600,00	2,91
01.1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	208.953.818.100,00	225.652.898.214,00	16.699.080.114,00	7,99
01.1.24.	KEARSIPAN	2.448.696.000,00	2.737.009.000,00	288.313.000,00	11,77
01.1.25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.724.045.000,00	7.808.516.200,00	2.084.471.200,00	36,42
02.	Pertahanan *)	-	-	-	-
03.	Ketertiban dan ketentraman	8.809.564.550,00	9.030.192.000,00	220.627.450,00	2,50
03.1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	8.809.564.550,00	9.030.192.000,00	220.627.450,00	2,50
04.	Ekonomi	165.860.695.900,00	181.339.713.500,00	15.479.017.600,00	9,33
04.1.07.	PERHUBUNGAN	7.922.483.000,00	7.976.820.500,00	54.337.500,00	0,69
04.1.14.	KETENAGAKERJAAN	7.248.000.000,00	7.629.000.000,00	381.000.000,00	5,26
04.1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	4.002.793.000,00	4.062.793.000,00	60.000.000,00	1,50
04.1.16.	PENANAMAN MODAL	3.308.563.900,00	3.397.191.900,00	88.628.000,00	2,68
04.1.21.	KETAHANAN PANGAN	2.565.680.000,00	2.732.140.000,00	166.460.000,00	6,49
04.1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	5.298.488.000,00	5.589.815.000,00	291.327.000,00	5,50

KODE	URAIAN	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
				Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
04.2.01.	PERTANIAN	58.526.859.000,00	60.881.496.500,00	2.354.637.500,00	4,02
04.2.02.	KEHUTANAN	12.335.140.000,00	13.323.831.600,00	988.691.600,00	8,02
04.2.03.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	8.259.164.000,00	9.269.164.000,00	1.010.000.000,00	12,23
04.2.05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	41.960.589.000,00	51.764.525.000,00	9.803.936.000,00	23,36
04.2.06.	PERDAGANGAN	5.528.754.000,00	5.558.754.000,00	30.000.000,00	0,54
04.2.07.	INDUSTRI	7.254.182.000,00	7.504.182.000,00	250.000.000,00	3,45
04.2.08.	KETRANSMIGRASIAN	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	-	-
05.	Lingkungan Hidup	5.779.047.138,00	5.930.021.088,00	150.973.950,00	2,61
05.1.05.	PENATAAN RUANG	1.368.447.138,00	1.494.421.088,00	125.973.950,00	9,21
05.1.08.	LINGKUNGAN HIDUP	4.410.600.000,00	4.435.600.000,00	25.000.000,00	0,57
06.	Perumahan dan fasilitas umum	345.510.497.000,00	401.126.416.550,00	55.615.919.550,00	16,10
06.1.03.	PEKERJAAN UMUM	276.556.297.000,00	317.503.291.650,00	40.946.994.650,00	14,81
06.1.04.	PERUMAHAN	68.954.200.000,00	83.623.124.900,00	14.668.924.900,00	21,27
07.	Kesehatan	113.900.227.000,00	124.356.465.847,00	10.456.238.847,00	9,18
07.1.02.	KESEHATAN	113.900.227.000,00	124.356.465.847,00	10.456.238.847,00	9,18
08.	Parwisata dan Budaya	18.350.913.000,00	18.966.696.800,00	615.783.800,00	3,36
08.1.17.	KEBUDAYAAN	8.134.447.500,00	7.089.320.700,00	(1.045.126.800,00)	(12,85)
08.2.04.	PARIWISATA	10.216.465.500,00	11.877.376.100,00	1.660.910.600,00	16,26
09.	Agama *)	-	-	-	-
10.	Pendidikan	37.006.768.000,00	44.380.058.695,00	7.373.290.695,00	19,92
10.1.01.	PENDIDIKAN	28.073.867.450,00	33.284.337.645,00	5.210.470.195,00	18,56
10.1.18.	PEMUDA DAN OLAHRAGA	5.617.836.550,00	7.780.657.050,00	2.162.820.500,00	38,50
10.1.26.	PERPUSTAKAAN	3.315.064.000,00	3.315.064.000,00	-	-
11.	Perlindungan Sosial	25.828.140.450,00	27.900.321.000,00	2.072.180.550,00	8,02

KODE	URAIAN	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
				Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
11.1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.539.600.000,00	3.386.130.000,00	846.530.000,00	33,33
11.1.13.	SOSIAL	23.288.540.450,00	24.514.191.000,00	1.225.650.550,00	5,26
JUMLAH		981.651.707.000,00	1.093.973.426.356,00	112.321.719.356,00	11,44

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 2014
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2014

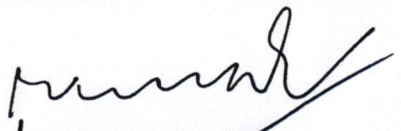
DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Halaman 439

GOLONGAN	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAFF	
Golongan IV / e	-	-	-	-	-	1	-	1
Golongan IV / d	1	11	-	-	-	3	4	19
Golongan IV / c	-	22	-	-	-	19	5	46
Golongan IV / b	-	22	141	-	-	18	13	194
Golongan IV / a	-	-	98	62	-	66	23	249
								-
JUMLAH GOLONGAN IV	1	55	239	62	-	107	45	509
Golongan III / d	-	-	56	526	-	237	244	1.063
Golongan III / c	-	-	1	133	-	144	381	659
Golongan III / b	-	-	-	28	-	151	1.374	1.553
Golongan III / a	-	-	-	-	-	79	674	753
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	57	687	-	611	2.673	4.028

GOLONGAN	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAFF	
Golongan II / d	-	-	-	-	-	109	298	407
Golongan II / c	-	-	-	-	-	21	395	416
Golongan II / b	-	-	-	-	-	6	782	788
Golongan II / a	-	-	-	-	-	-	290	290
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	136	1.765	1.901
Golongan I / d	-	-	-	-	-	-	52	52
Golongan I / c	-	-	-	-	-	-	62	62
Golongan I / b	-	-	-	-	-	-	44	44
Golongan I / a	-	-	-	-	-	-	46	46
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	204	204
TOTAL	1	55	296	749	-	854	4.687	6.642

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
 TAHUN ANGGARAN 2014

Halaman 441

NO.	KODE	JUDUL KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2013		JUMLAH REALISASI S/D AKHIR TAHUN 2013	JUMAH SISA ANGGARAN YG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (Rp.) TA. 2014	
			APBD TA. 2013	PERUBAHAN APBD TA. 2013		APBD TA. 2014	PERUBAHAN APBD TA. 2014
1.	1. 02. 02. 37. 07.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	11.235.154.700	15.235.154.700	14.620.425.593	-	614.729.107
2.	1. 02. 02. 37. 10.	Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS	11.750.155.050	11.756.155.050	11.219.819.050	-	536.336.000
3.	1. 03. 01. 26. 02.	Pembangunan Embung Kecil	19.488.085.250	21.588.285.250	21.121.446.900	-	466.838.350
4.	1. 04. 01. 23. 02.	Pembangunan Rumah	3.431.494.000	3.572.552.390	2.925.515.440	-	647.036.950
5.	1. 04. 01. 23. 03.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	14.500.750.000	33.955.781.100	31.933.893.150	-	2.021.887.950
6.	2. 01. 01. 19. 02.	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Jagung dan Padi	14.065.526.250	15.073.759.250	14.499.718.750	-	574.040.500
7.	2. 02. 01. 22. 03.	Pengelolaan Cendana Lestari	4.389.571.000	5.847.695.500	5.531.170.900	-	316.524.600
Jumlah :						-	5.177.393.457

NY GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 2014
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2014

**DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

Halaman 442

[illegible]

Catatan : Tidak ada pinjaman daerah

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA